



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BAPPEDA KOTA BANDA
ACEH
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Bappeda Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian seluruh target kinerja di bidang perencanaan dan penelitian.

LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 disusun sebagai bahan evaluasi atas rangkaian Program yang telah direncanakan di awal tahun anggaran 2022 dan sebagai bahan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan dapat diukur dengan jelas.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen LKjIP Bappeda Tahun 2022. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, khususnya bagi aparatur Bappeda Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian seluruh rencana kinerja Bappeda di tahun 2022.

Banda Aceh, 25 Januari 2023
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19640525 198903 1 026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
1.5. Dasar Hukum	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 1
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Banda Aceh	1
2.2. Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh 2022.. .	2
2.3. Penetapan Kinerja	14
2.4. Penganggaran Kegiatan	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	1
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	3
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	13
3.4. Keberhasilan dan Hambatan.....	19
 BAB IV PENUTUP	 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai. LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh mengacu pada Penetapan Kinerja (performance agreement) yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 untuk mencapai sasaran strategis (performance goal) Bappeda Kota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif”. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh tersebut, ditetapkanlah indikator sasaran strategis (performance indicator) yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh. Adapun Indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD;
2. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD; dan
3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target

Adapun sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cakupan LKjIP Kota Banda Aceh Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari:
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Isu strategis;
 4. Gambaran Umum Organisasi; dan
 5. Dasar hukum.
- b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, terdiri dari:
 1. Uraian singkat visi dan misi RPJMD Kota Banda Aceh periode 2017-2022 serta hubungannya dengan sasaran strategis Bappeda;
 2. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan;
 3. Penetapan Kinerja; dan
 4. Penganggaran Kegiatan.

c. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

1. Capaian Kinerja Organisasi;
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja;
3. Akuntabilitas Keuangan; dan
4. Keberhasilan dan Hambatan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2022 mencapai **92.62 persen** yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Tahun Anggaran 2022, realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar 9.077.188.985,- atau 88,06 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda sementara anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. Rp. 1.230.587.577,- atau 11,9 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan sudah dilaksanakan namun pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2023 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang disebabkan efek dari pandemic covid-19 sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2022 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

Banda Aceh, 25 Januari 2023
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19640525 198903 1 026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh ;
2. Mendorong Bappeda Kota Banda Aceh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Banda Aceh selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Bappeda Kota Banda Aceh.

Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda tahun 2022, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
2. Menguraikan aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran daerah yang dibelanjakan pada tahun 2022 dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan); dan
3. Menguraikan secara singkat hubungan antara capaian pelaksanaan Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 melalui realisasasi pelaksanaan Renja tahun 2022, beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 dan kaitannya dengan capaian tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh periode tahun 2017-2022, yaitu **meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif**.

1.3. Isu Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, ada beberapa permasalahan utama yang menjadi Isu strategis (strategic issues) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, mengingat kota Banda Aceh termasuk daerah rawan bencana, terutama gempa dan tsunami;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan sektoral, diharapkan sesuai dengan komitmen nasional dan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru;
3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan; dan
4. Mengoptimalkan Koordinasi antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, terutama dalam usaha pencapaian misi ke 5 walikota Banda Aceh periode tahun 2017-2022 yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**, yang menjadi tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi; Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

1.4.2 Sumber Daya Manusia di Bappeda Kota Banda Aceh

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 31 Desember 2022 sebanyak 65 orang, PNS sebanyak 44 orang, dan Non PNS sebanyak 17 orang, serta tenaga ahli 4 (empat) orang. Klasifikasi Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. dan tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala bidang	4
4	Kepala UPTB	1
5	Kasubbag/Perencana Ahli Muda	3
6	Kasubbid/Perencana Ahli Muda	11
7	Kepala TU UPTB	1
Jumlah		21

Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2022

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Tingkat	Jumlah (orang)
1	S2	14
2	S1	25
3	Diploma/Sederajat	3
4	SMA/Sederajat	2
Jumlah		44

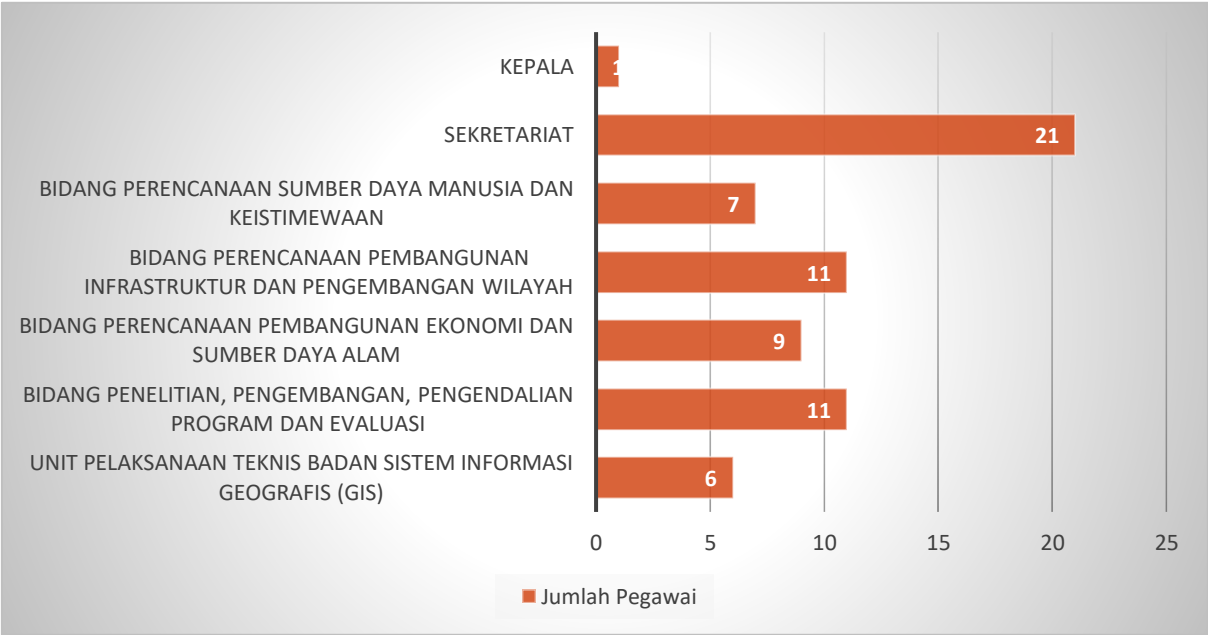
Sumber : Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2022

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas diketahui bahwa Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 25 orang, diikuti oleh Strata 2 sebanyak 14 orang,

dengan kondisi eksisting saat ini dengan beban kerja yang cukup berat Bappeda masih membutuhkan tenaga staf di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun sebaran jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh menurut bidang dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

Grafik 1.1
Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Menurut Bidang Tahun 2022



Sumber: Data Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 2022

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Buku Inventaris

No	Nama Barang	Jumlah	JumlahHarga
1	Tanah	1 parsial	6.336.087.000
2	Gedung dan Bangunan	4 unit	3.546.148.000
3	Peralatan dan Mesin	712 unit	3.668.046.914
4	Instalasi	2 unit	123.601.000
Jumlah			13.673.882.914

Sumber: Buku Inventaris, 2021

1.5 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Bappeda Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Banda Aceh

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak Memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, maka Bappeda Kota Banda Aceh di dalam Renstra Bappeda periode tahun 2017-2022 menetapkan tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh. Tujuan dan sasaran Strategis Bappeda Kota Banda Aceh ditetapkan untuk prioritas perencanaan program dan kegiatan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh selama lima tahun.

Berikut disajikan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi 5 RPJM 2017-2022 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras Dan Aplikatif	1. Membangun komitmen antar pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan 2. Membangun sistem database yang dapat diakses secara online	1. Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya 2. pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD

Sumber: Renstra Bappeda 2017-2022

2.2 Rencana Kerja, Program, dan Kegiatan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam perencanaan strategis Bappeda Kota Banda Aceh periode 2017–2022. Tahun ini menjadi tahun krusial bagi penyelesaian seluruh target yang telah ditetapkan diawal periode perencanaan. Program, kegiatan hingga sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda di tahun 2022 menjadi penentu bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda selama 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun Program kerja yang dilaksanakan di tahun ini merujuk pada nomenklatur perencanaan pembangunan dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020. Peraturan ini memisahkan program kerja Bappeda berdasarkan 3 bidang urusan yaitu urusan penunjang, urusan perencanaan, dan urusan penelitian yang secara total berjumlah sebanyak 4 program. Ketiga bidang urusan tersebut kemudian diuraikan ke dalam masing-masing 6 kegiatan penunjang, 6 kegiatan perencanaan, serta 3 kegiatan penelitian dengan keseluruhan sub kegiatan berjumlah sebanyak 34 sub kegiatan.

Berikut adalah rincian uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh di Tahun 2022, berdasarkan bidang urusan.

A. URUSAN PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program penunjang yang merupakan program yang mendukung kelancaran operasional Bappeda. Program ini memastikan bahwa seluruh urusan di Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Pada program penunjang inilah diidentifikasi seluruh kebutuhan dasar organisasi Bappeda seperti kebutuhan gaji dan administrasi pendukung, kebutuhan listrik, air, alat dan sarana komunikasi, kendaraan dinas, serta peralatan modal lainnya. Tanpa program penunjang, seluruh roda organisasi akan terhambat dan terkendala pelaksanaannya.

Seluruh kegiatan dan Sub kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh yang mendukung program penunjang di tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan.
 - d. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. URUSAN PERENCANAAN

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program ini berisikan kegiatan utama Bappeda termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Musrenbang, penyusunan dokumen perencanaan daerah, analisis data perencanaan, hingga pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini menjadi penentu utama keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu program prioritas Bappeda yang wajib dilaksanakan disetiap tahunnya.

Berikut adalah detil kegiatan dan sub kegiatan terkait program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di tahun 2022.

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - 1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - 3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain mengelola proses perencanaan pembangunan kota, Bappeda juga bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan khususnya antar perangkat daerah. Untuk memastikan seluruh perencanaan OPD sejalan dan selaras

dengan perencanaan kota, Bappeda juga melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan OPD. Sinkronisasi juga dilakukan dengan pihak provinsi dan pemerintah pusat, khususnya terhadap perencanaan pembangunan kota yang didanai oleh sumber pendanaan lainnya seperti APBA maupun APBN.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - 1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - 2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - 2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - 3.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - 3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - 3.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

C. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Melaksanakan penelitian merupakan salah satu fungsi Bappeda Kota Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akan kondisi riil berbagai permasalahan maupun potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan demikian akan

lebih banyak masukan dan dasar yang akurat bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Di tahun 2022, beberapa penelitian yang dilakukan diantaranya terkait dengan lingkungan hidup, Koperasi dan UMKM, penataan ruang, aspek-aspek sosial khususnya terkait kota inklusif, serta survey kota layak huni.

Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program penelitian dan pengembangan daerah di tahun 2022:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - 1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
2. Kegiatan Penelitian Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.
 - 2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - 2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
 - 2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
 - 2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.
3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - 3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - 3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Adapun hubungan program dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh untuk tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%
		1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen
		1.2 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%
		1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan
		1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan
		1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai
		1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis
		1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis
		1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis
		1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	44 Laporan
		1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan
		1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan
		1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit
		1.6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit
		2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%
		2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%
		2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
		2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang
		2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen
		2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%
		2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%
		2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen
		2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
		3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
		3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen
		3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
		3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
		3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%
		3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
		3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%
		4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen
		4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
		4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	6 Dokumen
		4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
		4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan
		4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan
		4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Dokumen
		4.3.1 Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan
		4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan

Sumber: RKT Bappeda Banda Aceh Tahun 2022

2.3 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab atau kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pada tahun 2022 alokasi belanja langsung Bappeda Banda Aceh sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan Walikota Banda Aceh sebesar Rp. 12.298.303.226,- dengan Indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	84% (151 Program RKPD yang Selaras dari 184 Program RPJMD)
		1.2 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100% (44 OPD dari 44 OPD)
		1.3 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	85% (17 Indikator dari 20 Indikator Kinerja RPJMD)

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran per Program Tahun 2022

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.468.145.715	
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.330.091.680	Mendukung Indikator Kinerja Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	561.004.506	Mendukung Indikator Kinerja Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	939.061.325	Mendukung Indikator Kinerja Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target
	JUMLAH	12.298.303.226	

2.4 Penganggaran Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kota Banda Aceh melaksanakan Program/kegiatan dengan rincian anggaran seperti dijelaskan pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Penganggaran Kegiatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	7.468.145.715	6.933.431.884
		1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	47.609.550	72.709.550
			1.1.1 Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	47.609.550	72.709.550
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	6.536.767.796	5.875.932.042
			1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	5.569.067.796	4.908.232.042
			1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	967.700.000	967.700.000
		1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000	25.000.000
			1.3.1 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.500,000	25.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
			1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	259.626.065	436.208.742
				1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3.421.396	3.421.396
				1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48.429.333	48.429.333
				1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	17.733.440	17.733.440
				1.4.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	190.041.896	365.624.573
			1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.607.694	361.607.694
				1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	244.380.000	247.380.000
				1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.227.694	114.227.694
			1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.034.610	161.973.056

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
				1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.889.296	85.667.762
				1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25.210.834	25.210.834
				1.6.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	154.934.480	51.095.260
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	3.330.091.680	2.263.145.805
			2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	2.992.095.864	1.844.966.454
				2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	58.611.850	58.611.850
				2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	167.441.626	123.791.626
				2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2.766.042.388	1.662.562.978

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
		2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	134.448.000	107.022.950
		2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	134.448.000	107.022.950
		2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	203.547.816	311.156.401
		2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	92.035.020	86.467.000
		2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	111.512.796	224.689.401
	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	561.004.506	466.755.223
		3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	138.337.500	106.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
				3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	56.512.500	43.137.500
				3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	81.825.000	62.862.500
			3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	201.957.829	202.808.525
				3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	62.147.556	61.914.700
				3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	95.761.795	96.961.775
				3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	44.048.478	43.932.050

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
			3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	220.709.177	157.946.698
				3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	48.957.314	48.237.650
				3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	132.526.649	48.887.048
				3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	39.225.214	60.822.000
	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target							
		4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	939.061.325	644.443.650
			4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	121.392.390	141.803.150
				4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	121.392.390	141.803.150

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Anggaran setelah perubahan (Rp)
			4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan		Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	437.411.330	100.140.000
				4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	107.805.150	0
				4.2.2	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	152.292.180	0
				4.2.3	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	106.062.500	100.140.000
				4.2.4	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	71.251.500	0
			4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	380.257.605	402.500.500
				4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	302.500.500	402.500.500
				4.3.2	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	77.757.105	0

Sumber: DPPA Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 (diolah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, organisasi seperti yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk menentukan tingkat capaian kinerja tersebut dibutuhkan suatu pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian indikator kinerja, sehingga terlihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah
Sumber: Lampiran VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010		

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022 (%)	REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)
1	2		3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	84	100	119.05
	2	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100
	3	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	85	50	58.82
Rata-Rata Persentase Realisasi						92.62

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator sasaran strategis, maka jika dilihat dari Tabel 3.2 rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2022 mencapai **92.62 persen**, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Bappeda tidak memiliki indikator yang diatur sesuai SPM/standar nasional maupun Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja Bappeda kota Banda Aceh sesuai Renstra Bappeda tahun 2017–2022, diukur dari lima (5) indikator. Namun demikian, akibat adanya perubahan kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dua (2) dari lima (5) indikator Bappeda tidak dapat diukur karena tidak selarasnya program kegiatan lama dengan yang baru juga akibat adanya perubahan pemakaian aplikasi perencanaan dan penganggaran yang semula menggunakan aplikasi lokal yaitu I-Ren menjadi aplikasi terintegrasi yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sejak Tahun Anggaran 2021 sesuai arahan Kemendagri.

Oleh sebab itu pada tahun 2021 dan 2022, atau di dua (2) tahun terakhir masa Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022, hanya tiga (3) indikator sasaran yang dapat diukur yaitu: Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD; Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD; dan Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target. Sedangkan dua (2) indikator lainnya dalam Renstra Bappeda yaitu Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD dan Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan, hanya dapat diukur hingga tahun 2021.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Perbandingan capaian kinerja Bappeda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021-2022 dijelaskan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2021 dengan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)
1	2	3	4
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1 Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	115.52	119.05
	2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD	-	-
	3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	100	100
	4 Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	68.75	58.82
	5 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan	-	-
Rata-Rata Persentase Realisasi Per Tahun		94.66	92.62

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2021 maka capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 94.66 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 92.62 persen, namun skala nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 masih berada pada kriteria **sangat tinggi**.

Dilihat dari pencapaian indikator Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD sebesar 119.05 persen, dan Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD sebesar 100 persen menunjukkan bahwa fungsi Bappeda dalam hal pembinaan, dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah bisa dikatakan berhasil. Berhasilnya Bappeda dalam menjalankan khususnya fungsi tersebut menghasilkan konsistensi dan integrasi yang jelas antar dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD) maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja). Selain itu dengan terjaganya konsistensi dan integrasi antar dokumen perencanaan tersebut maka keberhasilan pencapaian target kinerja salah satu dokumen perencanaan secara otomatis akan berkontribusi secara nyata terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Bappeda dalam mencapai target kinerja tahunan (Renja/RKT) tahun 2022 telah mengungkit tercapainya sasaran Renstra Bappeda 2017-2022 dan sasaran RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2022, yang kemudian mengungkit pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Adapun capaian terhadap indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target, pada tahun 2022 hanya 10 (sepuluh) IKU RPJMD yang mencapai target dari 17 (tujuh belas) IKU RPJMD yang ditargetkan pada tahun 2022, hal ini di antaranya disebabkan oleh refocusing dan relokasi belanja. Selain itu dampak pandemi Covid-19 juga mengakibatkan iklim usaha memburuk, tenaga kerja dikurangi dan pengangguran bertambah. Beberapa kegiatan pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2023 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang disebabkan efek dari pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2022 pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	6.933.431.884	6.300.547.128	90,87
		1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	100%	100%	100%	72.709.550	72.709.550	100,00
		1.1.	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	72.709.550	72.709.550	100,00
		1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	100%	100%	5.875.932.042	5.547.861.699	94,42
		1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4.908.232.042	4.750.843.262	96,79
		1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	967.700.000	797.018.437	82,36
		1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	=	25.000.000	-	0,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		1.3.1	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Pegawai	-	-	25.000.000	-	0,00
		1.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100%	60,88%	60,88%	436.208.742	265.553.077	60,88%
		1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100%	3.421.396	3.421.396	100,00
		1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100%	49.429.333	49.429.333	100,00
		1.4.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	100%	17.733.440	17.733.440	100,00
		1.4.4	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	44 Laporan	17 Laporan	53,32%	365.624.573	194.968.908	53,32%
		1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	361.607.694	323.362.920	89,42%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		1.5.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	247.380.000	229.082.972	92,60
		1.5.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	114.227.694	94.279.948	82,54
		1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	56,22%	56,22	161.973.856	91.059.882	56,22
		1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit	79,99	85.667.762	68.525.664	79,99
		1.6.2	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	114 Unit	32 Unit	89,38	25.210.834	22.534.218	89,38
		1.6.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit	-	-	51.095.260	-	-
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras	Persentase keselarasan Program RKPD	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	82%	81,05	81,05	2.263.145.805	1.834.294.157	81,05

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
dan aplikatif	terhadap RPJMD	2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah	100%	100%	87,97	1.844.966.454	1.623.041.388	87,97
		2.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis	2 Jenis	90,68	58.611.850	53.150.000	90,68
		2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang	250 Orang	71,34	123.791.626	88.316.700	71,34
		2.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	89,11	1.662.562.978	1.481.574.688	89,11
		2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	107.022.950	99.426.950	92,90
		2.2.1	Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis	3 Jenis	100%	107.022.950	99.426.950	92,90
		2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100%	35,94%	35,94%	311.156.401	111.825.819	35,94%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		2.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	86.467.000	73.552.000	85,06
		2.3.2	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan	1 Laporan	17,03	224.689.401	38.273.819	17,03
	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	73,31	73,31	466.755.223	342.173.200	73,31
		3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	81,47	81,47	106.000.000	86.362.500	81,47
		3.1.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	43.137.500	35.062.500	81,28

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		3.1.2	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	62.862.500	51.300.000	81,61
		3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	100%	100%	202.808.525	155.682.000	76,76
		3.2.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	61.914.700	53.400.000	86,25
		3.2.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan	1 Laporan	100%	96.961.775	70.252.000	72,45
		3.2.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	43.932.050	32.030.000	72,91

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100%	70%	70%	157.946.698	100.128.700	63,39
		3.3.1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	48.237.650	41.847.500	86,75
		3.3.2	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan	1 Laporan	2,39	48.887.048	1.168.950	2,39
		3.3.3	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	60.822.000	57.112.250	93,90
	Persentase Indikator Kinerja dalam	4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%	644.443.650	600.174.500	93,13

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
	RPJMD yang mencapai target	4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	141.803.150	100.684.500	71,00
		4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang social dan kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	141.803.150	100.684.500	71,00
		4.1.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	644.443.650	600.174.500	93,13
		4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100.140.000	100.140.000	100,00
		4.2.1	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan	1 Laporan	100%	100.140.000	100.140.000	100,00
		4.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	402.500.500	399.350.000	99,22
		4.3.1	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan	2 Laporan	100%	402.500.500	399.350.000	99,22

Berdasarkan Tabel di atas Bappeda Kota Banda Aceh memiliki 1 (satu) sasaran strategis Aceh yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:

1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD.

Indikator ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100 % hal ini disebabkan adanya konsistensi program RKPD dengan RPJM tahun 2022.

2. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD

Indikator ini di dukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%, karena bidang-bidang koordinasi di Bappeda telah melakukan asistensi juga pendampingan untuk penyusunan dokumen Renja OPD sehingga selaras dengan dokumen RKPD.

3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target

Indikator ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 58.82 persen, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 hanya 10 (sepuluh) IKU RPJMD yang mencapai target dari 17 (tujuh belas) IKU RPJMD yang ditargetkan pada tahun 2022.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang sangat penting adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban institusi publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak internal dan pihak eksternal.

Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp.12.298.303.226,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp., 12.249.873.893- dan belanja Modal sebesar Rp. 48.429.333,-. Pemerintah Kota Banda Aceh Merevisi APBK TA.2022 untuk dialihkan penyelesaian pembayaran belanja utang kegiatan Tahun 2021 dan penyesuaian dana transfer sehingga Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 mengalami revisi, dimana Anggaran belanja Bappeda Perubahan ditetapkan sebesar Rp. 10.307.776.562,- yang

dialokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 10.258.347.229,- dan belanja modal sebesar Rp. 49.429.333,-.

Sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022, realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.077.188.985,- atau 88,06 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.230.587.577,- atau 11,94 persen, disebabkan karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan lagi kegiatan karena tidak tersedianya Surat Penyediaan Dana (SPD) serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi. Serta ada beberapa kegiatan yang pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya. Pengalokasian belanja Program dan Kegiatan Bappeda tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Urusan Wajib adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bappeda pada Tahun anggaran 2022 telah melaksanakan 2 (dua) urusan, 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 30 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan dan 13 Sub kegiatan

2. Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah, Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui:

- 1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
- 2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel. 3.5
Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran
Tahun Anggaran 2022

KODE	PROGRAM/KEGAITAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5,01	BAPPEDA	10.307.776.562	9.077.188.985	88,06	1.230.587.577	11,94
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.933.431.884	6.300.547.128	90,87	632.884.756	9,13
5.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.709.550	72.709.550	100,00	-	0,00
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.709.550	72.709.550	100,00	-	0,00
5.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.875.932.042	5.547.861.699	94,42	328.070.343	5,58
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.232.042	4.750.843.262	96,79	157.388.780	3,21
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	967.700.000	797.018.437	82,36	170.681.563	17,64
5.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	-	0,00	25.000.000	100
5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	-		25.000.000	100
5.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.208.742	265.553.077	60,88%	170.655.665	39,12
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.421.396	3.421.396	100,00	-	0,00

KODE	PROGRAM/KEGAIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.429.333	49.429.333	100,00	-	0,00
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.733.440	17.733.440	100,00	-	0,00
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.624.573	194.968.908	53,32%	170.655.665	46,68
5.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.607.694	323.362.920	89,42%	38.244.774	10,58
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.380.000	229.082.972	92,60	18.297.028	7,40
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.227.694	94.279.948	82,54	19.947.746	17,46
5.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.973.856	91.059.882	56,22	70.913.974	43,78
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.667.762	68.525.664	79,99	17.142.098	20,01
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.210.834	22.534.218	89,38	2.676.616	10,62
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.095.260	-		51.095.260	100
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.263.145.805	1.834.294.157	81,05	428.851.648	18,95
5.01.02.2.01	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.844.966.454	1.623.041.388	87,97	221.925.066	12,03
5.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (DAK)	58.611.850	53.150.000	90,68	5.461.850	9,32
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	123.791.626	88.316.700	71,34	35.474.926	28,66
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1.662.562.978	1.481.574.688	89,11	180.988.290	10,89
5.01.02.2.02	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	107.022.950	99.426.950	92,90	7.596.000	7,10
5.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	107.022.950	99.426.950	92,90	7.596.000	7,10
5.01.02.2.03	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	311.156.401	111.825.819	35,94%	199.330.582	64,06
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	86.467.000	73.552.000	85,06	12.915.000	14,94

KODE	PROGRAM/KEGAIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	224.689.401	38.273.819	17,03	186.415.582	82,97
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	466.755.223	342.173.200	73,31	124.582.023	26,69
5.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	106.000.000	86.362.500	81,47	19.637.500	18,53
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.137.500	35.062.500	81,28	8.075.000	18,72
5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.862.500	51.300.000	81,61	11.562.500	18,39
5.01.03.2.02	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	202.808.525	155.682.000	76,76	47.126.525	23,24
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.914.700	53.400.000	86,25	8.514.700	13,75
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	96.961.775	70.252.000	72,45	26.709.775	27,55
5.01.03.2.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.932.050	32.030.000	72,91	11.902.050	27,09
5.01.03.2.03	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	157.946.698	100.128.700	63,39	57.817.998	36,61
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48.237.650	41.847.500	86,75	6.390.150	13,25
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	48.887.048	1.168.950	2,39	47.718.098	97,61
5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.822.000	57.112.250	93,90	3.709.750	6,10
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	644.443.650	600.174.500	93,13	44.269.150	6,87%
5.05.02.2.02	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	141.803.150	100.684.500	71,00	41.118.650	29,00

KODE	PROGRAM/KEGAIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	141.803.150	100.684.500	71,00	41.118.650	29,00
5.05.02.2.03	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.140.000	100.140.000	100,00	-	0,00
5.05.02.2.03.09	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100.140.000	100.140.000	100,00	-	0,00
5.05.02.2.04	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	402.500.500	399.350.000	99,22	3.150.500	0,78
5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	402.500.500	399.350.000	99,22	3.150.500	0,78

Dari tabel tersebut dapat dilihat, dari empat program kegiatan yang dilaksanakan capaian realisasi tertinggi dari anggaran yang direncanakan pada Program Penelitaian Dan Pengembangan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.644.443.650 apat direalisasikan sebesar Rp.,- 600.174.500 atau 93,13 persen, anggaran yang tidak direalisasikan lagi sebesar 6,87 persen. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 6.933.431.884 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.300.547.128. Sedangkan pada Program Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.263.145.805,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.834.294.157,- atau 81,05 persen. Sedangkan Pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah hanya terealisasi sebesar 73,31 persen dari rencana anggaran yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase realisasi belanja Bappeda Tahun anggaran 2022 sebesar 88,06 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran 2021. Selama 5 (lima) tahun terakhir rasio antara anggaran dan realisasi belanja rata-rata persentasenya sebesar 92,58 persen pertahunnya, ini menunjukkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel. 3.6
Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2018 s/d 2022

URAIAN	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI %				
	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA	94,39	92,72	97,66	84,33	88,06
BELANJA PEGAWAI	94,01	96,08	103,51	102,53	96,97
BELANJA BARANG DAN JASA	93,90	88,63	88,39	68,84	79,94
BELANJA MODAL	99,30	99,79	91,40	100,00	100,00

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2022 dalam merealisasikan anggaran belanja menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2021.

3.4 Keberhasilan dan Hambatan

Ada beberapa faktor penting yang menjadi pemicu keberhasilan Bappeda sebagai organisasi dalam mencapai target-target kinerja ditahun 2022 antara lain:

1. Komitmen dan semangat dari ASN di lingkungan Bappeda terkait pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai di lingkungan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan.
3. Adanya hubungan yang cukup baik antara Bappeda dengan pihak lain khususnya perangkat daerah lainnya dalam menjalankan fungsi koordinasi.
4. Adanya pemanfaatan teknologi informasi mulai dari system informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Adapun faktor yang menghambat dalam pencapaian target kinerja Bappeda tahun 2022 antara lain:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar OPD serta *stakeholders* terkait
3. Minimnya pelatihan perencanaan pembangunan
4. Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil (*outcome*) pembangunan
6. Minimnya penelitian perencanaan pembangunan

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan utama tersebut, solusi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan sumber daya (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan itu juga mulai diusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan kepada perangkat daerah yang membidangi yaitu BKPP.
2. Mengoptimalkan koordinasi antar OPD serta stakeholders terkait.
3. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat khususnya terkait perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi kepada produsen data perencanaan agar dapat menghasilkan data yang valid, up to date, dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
6. Meningkatkan penelitian perencanaan pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Bappeda Kota Banda Aceh, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban Bappeda Kota Banda Aceh untuk kepentingan internal dan kepentingan eksternal (publik) dalam upaya mendorong akuntabilitas institusi pemerintahan. Bagi kepentingan internal, LKjIP dapat dijadikan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang menunjukkan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022. Sementara bagi kepentingan eksternal (publik), LKjIP menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan hasil pencapaian kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat terlihat dari rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran pada tahun 2022 mencapai 92.62%, yang berarti bahwa Skala Nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022 berada pada kriteria **sangat tinggi**. Namun keberhasilan pencapaian target indikator sasaran strategis Bappeda Kota Banda Aceh sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh periode Tahun 2017-2022 dapat terwujud.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>